



Pengaruh *Environmental Social and Governance*, Manajemen Laba, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Nilia Aulia Rahmawati¹, Rosita Wulandari²

¹⁻²Universitas Pamulang, Indonesia

Email : nilaaulia22@gmail.com¹, dosen00754@unpam.ac.id²

Penulis Korespondensi: nilaaulia22@gmail.com

Abstract. *Abstract. Tax avoidance is frequently a subject of research because corporate tax burdens can be minimized through specific tax strategies that potentially reduce state revenue. An increase in corporate assets often accompanies rising profits, thereby attracting greater scrutiny from tax authorities. Conversely, a decline in revenue and profit can lead to a reduction in tax liabilities. To preserve cash flow and financial performance, companies may leverage tax regulations as part of their tax burden management strategy. This research aims to analyze the impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) factors, earnings management, and good corporate governance on tax avoidance among publicly listed companies with ESG scores available in the Bloomberg database for the 2020–2024 period. Purposive sampling was used to select 55 observations from 11 companies included in the research sample. Using EViews 12 software, panel data regression was employed to analyze the data. The results indicate that: (1) ESG, earnings management, and good corporate governance simultaneously influence tax avoidance; (2) ESG does not individually influence tax avoidance; (3) earnings management does not individually influence tax avoidance; and (4) good corporate governance individually influences tax avoidance. These findings indicate that ESG and earnings management do not have a significant partial effect on tax avoidance, whereas good corporate governance has a significant partial effect on tax avoidance.*

Keywords: *Earnings management; Environmental Social dan Governance; Good Corporate Governance; Panel Data Regression; Tax Avoidance.*

Abstrak. Penghindaran pajak kerap dijadikan objek penelitian karena beban pajak perusahaan dapat ditekan melalui strategi perpajakan tertentu yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Peningkatan aset perusahaan dapat disertai dengan kenaikan laba sehingga pengawasan dari otoritas perpajakan menjadi lebih besar. Sementara itu, penurunan pendapatan dan laba dapat menyebabkan pajak terutang ikut berkurang. Dalam upaya menjaga arus kas dan kinerja keuangan, pemanfaatan ketentuan perpajakan dapat dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan beban pajak. Tujuan dari studi ini guna menganalisis pengaruh *Environmental Social and Governance*, Manajemen Laba, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak pada seluruh perusahaan *Go Public* yang memiliki ESG Score pada data Bloomberg Periode 2020-2024. Sampel studi ini mencakup 11 perusahaan disertai 55 data pengamatan yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel melalui *software EViews 12*. Perolehan studi memperlihatkan bahwasanya (1) *Environmental Social and Governance*, Manajemen Laba, dan *Good Corporate Governance* secara keseluruhan berpengaruh bagi Penghindaran Pajak, (2) *Environmental Social and Governance* secara parsial tidak berpengaruh bagi Penghindaran Pajak, (3) Manajemen Laba dengan parsial tidak berpengaruh bagi Penghindaran Pajak, (4) *Good Corporate Governance* dengan parsial berpengaruh bagi Penghindaran Pajak. Temuan ini membuktikan bahwasanya *Environmental Social and Governance*, Manajemen Laba, dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama mampu memengaruhi Penghindaran Pajak, meskipun secara masing-masing variabel tidak memberikan pengaruh bagi Penghindaran Pajak.

Kata kunci: *Environmental Social dan Governance; Good Corporate Governance; Manajemen Laba; Penghindaran Pajak; Regresi Data Panel.*

1. LATAR BELAKANG

Kedudukan strategis pada arus penerimaan negara ditempati oleh pajak, yang berfungsi sebagai penyumbang utama dengan proporsi yang dominan dibandingkan berbagai sumber pemasukan negara lainnya. Dominasi tersebut memperlihatkan bahwasanya pajak memiliki kapasitas besar sebagai penopang utama dalam struktur fiskal nasional. Oleh karena itu,

keberadaan pajak dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Defisit anggaran pada pos pendapatan perpajakan nasional tidak lepas dari implikasi taktik meminimalkan pajak oleh sejumlah perusahaan di Indonesia.

Namun, perlu dibedakan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam memahami fenomena perpajakan. *Tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum. Perbedaan tersebut tercermin dalam putusan pengadilan tertanggal 8 Maret 2021 terhadap Asan selaku Direktur PT Extel Communication, yang dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp5,19 miliar karena terbukti dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sejak tahun 2013 hingga 2015, sehingga menimbulkan utang pokok pajak sebesar Rp2,59 miliar. Kasus tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *tax evasion* atau *tax non-compliance*, sehingga tidak dapat dijadikan representasi langsung dari *tax avoidance* yang menjadi fokus penelitian. Namun, kasus ini menunjukkan adanya batas yang tegas antara strategi pengelolaan beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan dengan tindakan penghindaran kewajiban pajak yang melanggar hukum, sehingga fenomena *tax avoidance* dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai upaya perusahaan meminimalkan beban pajak melalui strategi perpajakan yang berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan guna mengurangi beban pajak perusahaan dengan penggunaan kelemahan atau celah yang terdapat pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Pihak manajemen berusaha mengoptimalkan profitabilitas melalui efisiensi beban perpajakan dengan mengeksploitasi celah dalam regulasi yang berlaku. Strategi ini diimplementasikan agar perusahaan dapat meminimalkan kontribusinya secara legal (Nurjanah & Romadhina, 2025). Peningkatan laba yang dihasilkan dari kebijakan tersebut pada hakikatnya berjalan beriringan dengan risiko sanksi regulasi dan keretakan kredibilitas korporasi. Dalam jangka panjang, kerugian akibat rusaknya nama baik perusahaan dapat melampaui keuntungan finansial yang telah diperoleh. Hal ini memperlihatkan adanya konsekuensi ganda yang memengaruhi stabilitas operasional dan posisi pasar perusahaan di masa depan (Laurensia & Mustika, 2024).

Sebagai determinan yang berpotensi memicu praktik penghindaran pajak, *Environmental, Social, and Governance* melakukan praktik pengurangan beban pajak oleh suatu organisasi dapat diinterpretasikan sebagai indikasi belum optimalnya implementasi

tanggung jawab sosial dan lingkungan, beserta belum maksimalnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Rahmah, 2023). Didapatkan perolehan terdahulu yang memperlihatkan adanya temuan dari (Nurlaely & Dewi, 2023) dan (Chandra, 2021) di mana pengaruh yang muncul dari penerapan *Environmental Social Governance* teridentifikasi memiliki arah negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian (Feronika & Aris, 2024) memperlihatkan bahwasanya dengan parsial, keberadaan *Environmental Social Governance* tetap memberikan Pengaruh bagi penghindaran pajak.

Laporan keuangan sering kali tidak mencerminkan realitas finansial perusahaan yang sebenarnya akibat adanya praktik manajemen laba, yang menjadi faktor kedua dalam kajian ini. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki motivasi tersendiri untuk merekayasa angka pendapatan baik menaikkan maupun menurunkannya dengan memanfaatkan pilihan kebijakan akuntansi demi meraih target tertentu (Octavia & Sari, 2022). Berdasarkan penelitian (Saprianto & Anggraini, 2024) dan diperkuat oleh (Febriyanti & Faisal, 2023) memperlihatkan manajemen laba berdampak bagi penghindaran pajak. Namun, pada studi (Sapitri & Hunein, 2022) memperlihatkan manajemen laba tidak berdampak bagi penghindaran pajak.

Keberadaan *Good Corporate Governance* tetap memberikan Pengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberadaan sistem tersebut difungsikan guna mengharmonisasikan beragam kepentingan para pemangku kepentingan agar berada pada kondisi yang seimbang. Penelitian pada (Muljadi et al., 2022) dan (Cindy Irawan, 2022), *Good Corporate Governance* tidak berdampak bagi penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian (Sari & Baliwerti, 2023) memperlihatkan adanya pengaruh *Good Corporate Governance* bagi penghindaran pajak.

Berpedoman pada fenomena penghindaran pajak serta adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG), manajemen laba, dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap penghindaran pajak, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *go public* di Indonesia yang memiliki *ESG Score* dalam basis data Bloomberg selama periode 2020–2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel lintas sektor perusahaan yaitu seluruh perusahaan *go public* yang memiliki *ESG Score* pada Bloomberg, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keterkaitan ESG, manajemen laba, dan GCG dengan penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia selama periode pengamatan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan yang diuraikan oleh Jensen & Meckling (1976) relasi keagenan terjadi ketika pemilik perusahaan sebagai prinsipal menyerahkan wewenang kepada manajemen selaku agen untuk menjalankan perusahaan dan menentukan keputusan tertentu (Laurensia & Mustika, 2024). Diferensiasi kepentingan di antara pemegang saham dengan manajemen bisa memunculkan permasalahan pada hubungan keagenan. Dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan, tindakan manajemen dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun imbalan yang diterima. Akibatnya, keputusan perusahaan berpotensi lebih diarahkan pada pencapaian kepentingan manajemen daripada pemenuhan kepentingan pemegang saham. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk permasalahan keagenan yang dapat terjadi dalam perusahaan.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi yang dipaparkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) mengungkapkan keberlangsungan kegiatan organisasi perlu dijaga agar senantiasa selaras dengan norma, nilai, serta batasan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. (Nurlaely & Dewi, 2023). Teori legitimasi menjelaskan bahwasanya keberadaan perusahaan tidak terlepas dari penerimaan masyarakat terhadap aktivitas yang dijalankan. Legitimasi menjadi bagian penting bagi perusahaan karena dapat mendukung keberlangsungan kegiatan operasional serta perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan nilai beserta norma yang berkembang di lingkungan sosial. Keselarasan tersebut diperlukan karena keberlangsungan perusahaan turut dipengaruhi oleh hubungan yang terjalin dengan masyarakat. Maka dari itu, penerapan aktivitas perusahaan yang sesuai dengan harapan dan ketentuan sosial dapat mendorong diperolehnya serta dipertahankannya legitimasi dari masyarakat (Nurjanah & Romadhina, 2025).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak ialah tindakan sah perusahaan yang diterapkan guna menurunkan kewajiban pajaknya secara sah dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang yang ada (Nurjanah & Romadhina, 2025). Tindakan penghindaran pajak muncul akibat beban pajak yang berat pada perusahaan yang mendesak mereka untuk mengupayakan penghindaran pajak guna mengurangi tagihan pajak yang harus dibayarkan. *Effective tax rate* bisa berperan sebagai indikator untuk mengukur tingkat penghindaran pajak, dikarenakan pembayaran pajak yang telah terjadi bisa dimanfaatkan sebagai tolak ukur apakah perusahaan melaksanakan penghindaran pajak (Laurensia & Mustika, 2024).

Environmental, Social, and Governance

Environmental, Social, and Governance mencakup serangkaian aktivitas yang berfokus pada aspek ekologi sekitar, keselarasan dengan lingkungan sosial, beserta penguatan bagi internal perusahaan, bertujuan guna meraih target perusahaan serta mencukupi keperluan sejumlah pihak yang berkepentingan (Nurlaely & Dewi, 2023). Setiap aspek memiliki komponen saling berkaitan satu sama lain. Adapun *environmental, social, governance score* mencakup 93 poin data yang membentuk berupa skor 0-100 (Wulandari et al., 2023).

Manajemen Laba

Manajemen laba ialah bentuk intervensi yang dilaksanakan manajemen akan tahapan pembuatan beserta pemaparan laporan finansial. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur informasi finansial yang dilaporkan maupun menentukan alternatif kebijakan akuntansi yang masih sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya manajemen dalam mencapai kepentingan dan tujuan tertentu bagi perusahaan (Saragih & Rusdi, 2024).

Good Corporate Governance

Tata kelola yang mengatur pembagian kewenangan serta tanggung jawab antara direksi, dewan komisaris, *shareholder*, dan pihak-pihak berkepentingan dalam suatu perusahaan disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG ditujukan untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui tata kelola yang efektif, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap keputusan dan kebijakan manajemen (Nurlaely & Dewi, 2023). Dalam penelitian ini, GCG dioperasionalkan melalui kepemilikan institusional sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan, yang mencerminkan peran pemegang saham institusional dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Kepemilikan institusional yang lebih besar memberikan kapasitas pengawasan yang lebih kuat terhadap tindakan manajemen sehingga keputusan perusahaan diharapkan lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham dan prinsip tata kelola perusahaan.

Good Corporate Governance memiliki cakupan yang relatif luas sehingga penerapannya tidak dapat direpresentasikan hanya melalui kepemilikan institusional. Prinsip tata kelola perusahaan dapat diwujudkan melalui sejumlah mekanisme pengawasan, antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan mekanisme tata kelola lainnya. Dengan demikian, penggunaan kepemilikan institusional sebagai satu-satunya indikator perlu dibatasi pada aspek pengawasan yang dilakukan oleh

pemegang saham institusional agar terdapat keselarasan antara konsep yang digunakan dan metode pengukurannya. Penggunaan kepemilikan institusional sebagai proksi GCG didukung oleh penelitian terdahulu yang menggunakan mekanisme kepemilikan institusional untuk merepresentasikan aspek pengawasan dalam tata kelola perusahaan serta menguji keterkaitannya dengan penghindaran pajak (Darsani & Sukartha, 2021; Pontoh & Kustinah, 2024).

Pengaruh *Environmental, Social and Governance*, Manajemen Laba, dan *Good Corporate Governance* bagi Penghindaran Pajak

Keberadaan *environmental, social and governance* untuk memperlihatkan bagaimana perusahaan melaksanakan pengelolaan akan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, beserta tata kelola perusahaan secara berkelanjutan (Agusetiani & Irawan, 2025). Manajemen Laba ialah upaya yang dilaksanakan oleh manajemen guna memberi dampak bagi penyajian laporan finansial dengan tujuan memperoleh keuntungan khusus. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan manajemen dalam meningkatkan kesejahteraannya, tetapi juga sebagai strategi untuk membentuk penilaian positif investor terhadap kondisi perusahaan (Saprianto & Anggraini, 2024). Penerapan *Good Corporate Governance* diperlukan untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang terarah melalui hubungan yang diatur antara pemegang saham, direksi, komisaris, dan pihak manajemen. Melalui mekanisme tersebut, potensi diferensiasi urgensi di antara pemilik beserta pengelola perusahaan dapat dikendalikan agar urgensi jangka panjang perusahaan beserta pemilik saham tidak dikorbankan demi kepentingan pribadi manajemen (Laurensia & Mustika, 2024).

H1 : Diduga *Environmental, Social and Governance (ESG)*, Manajemen Laba, dan *Good Corporate Governance (GCG)* yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Environmental, Social and Governance* bagi Penghindaran Pajak

Ketidakstabilan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, menjadi kesempatan untuk menghindari pajak (Nurjanah & Romadhina, 2025). Maka dari itu, pada saat perusahaan ada pada lingkungan yang bergejolak, mereka akan lebih ikut berpartisipasi pada kegiatan penghindaran pajak. *Score Environmental, Social and Governance* diperoleh dari database *Bloomberg* dengan rentang nilai 0 hingga 100. Skor ini menggambarkan kinerja perusahaan berdasarkan aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), beserta tata kelola perusahaan (*governance*) (Wulandari et al., 2023).

H2 : Diduga *Environmental, Social and Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Manajemen Laba bagi Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi, manajemen cenderung ingin menekan total pajak yang wajib dikeluarkan perusahaan sementara pemegang saham belum tentu memiliki pandangan yang sama. Untuk mendukung tujuan tersebut, manajemen dapat menyusun laporan laba dengan menggunakan teknik akuntansi tertentu yang membuat pendapatan terlihat lebih rendah sehingga beban pajak perusahaan dapat berkurang (Octavia & Sari, 2022). Akibatnya, berbagai pihak akan lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.

H3 : Diduga Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Kepemilikan Institusional bagi Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh berbagai lembaga, selayaknya bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan pemerintah, maupun institusi lainnya. Investor institusional tidak hanya berperan sebagai pemegang saham, tetapi turut melaksanakan pemantauan akan kinerja manajemen. Pengawasan tersebut bertujuan supaya setiap keputusan yang diambil manajemen sesuai dengan urgensi perusahaan beserta pemegang saham. Maka dari itu, semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat pula pemantauan yang dilakukan (Rananda, 2023).

H4 : Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024 dan memiliki *ESG Score* dalam basis data *Bloomberg*. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024. Populasi yang didapatkan sebesar 99 perusahaan. Kriteria yang digunakan adalah perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode pengamatan, memiliki *ESG Score* dalam basis data *Bloomberg*, serta perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan rupiah. Lalu berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 11 perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria dengan periode pengamatan selama lima tahun, sehingga menghasilkan 55 observasi yang digunakan dalam penelitian. Proses seleksi sampel dilakukan secara bertahap berdasarkan kriteria tersebut.

Tabel 1. Operasi Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	Skala
1.	Penghindaran Pajak (Octavia & Sari, 2022)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	Environmental Social Governance (Nurlaely & Dewi, 2023)	$ESG = \frac{\text{Nilai Pengungkapan ESG}}{\text{Total Pengungkapan Maksimal}}$	Numerik 0-100
3.	Manajemen Laba (Suripto, 2021)	$1. TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$ $2. \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$ $3. NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$ $4. DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$	Rasio
4.	Kepemilikan Institusional (Kartika et al., 2023)	$INST = \frac{\text{Proporsi saham investor institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$	Rasio

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Analisis data memanfaatkan model regresi data panel, data diolah menggunakan *E-Views* 12. Tahapan analisa data meliputi uji statistik deskriptif, pengujian penentuan model (uji *chow*, uji *hausman*, beserta pengujian *lagrange multiplier*). Lalu, pengujian asumsi klasik yang bertujuan menguji kelayakan data yang memanfaatkan pengujian normalitas, multikolinearitas, pengujian heteroskedastisitas, beserta pengujian autokorelasi). Lalu, pengaruh variabel bebas bagi variabel terikat dilaksanakan pengujian memanfaatkan pengujian hipotesis, termasuk pengujian koefisien determinasi (R^2), pengujian keseluruhan (uji F), beserta pengujian parsial (uji t).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	ESG	ML	KI	ETR
Mean	47.42436	-0.019731	69485.33	0.224480
Median	49.17000	-0.014691	63723.00	0.218499
Maximum	61.91000	0.333410	97288.00	0.473197
Minimum	29.85000	-0.251306	45274.00	0.187863
Std. Dev.	9.479457	0.074073	16381.45	0.044991
Observations	55	55	55	55

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Pada variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, teridentifikasi skor minimal sejumlah 0.187863 serta skor maksimal mencapai 0.473197. Adapun rerata (mean) tercatat sejumlah

0.224480 melalui tingkat penyebaran yang direpresentasikan oleh standar deviasi sejumlah 0.044991.

Environmental, social, and governance distribusi nilai memperlihatkan batas terendah sejumlah 29.85000 dan batas tertinggi sejumlah 61.91000. Nilai mean yang diperoleh adalah 47.42436, sedangkan besaran standar deviasi tercatat sejumlah 9.479457, yang mencerminkan variasi data pada variabel tersebut.

Rentang nilai yang diperoleh oleh variabel manajemen laba memperlihatkan angka terendah sejumlah -0.251306 serta angka tertinggi mencapai 0.333410. Nilai mean yang dihasilkan tercatat sejumlah -0.019731 disertai standar deviasi sejumlah 0.074073.

Besaran skor pada variabel kepemilikan institusional memperlihatkan titik minimum sejumlah 45274.00 beserta titik maksimal sejumlah 97288.00. Skor mean tertera sejumlah 69485.33, disertai standar deviasi sejumlah 16381.45.

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.433474	(10,41)	0.2003
Cross-section Chi-square	16.490590	10	0.0864

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Pada tabel 3, skor *Prob. Cross Section Chi-square* ialah 0.0864 melebihi 0,05. Berdasarkan hasil Uji Chow, diperoleh bahwa model yang sesuai adalah CEM. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan dengan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.810017	3	0.0782

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Pengujian selanjutnya akan dilakukan menggunakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan model yang lebih sesuai antara CEM dan *Random Effect Model* (REM).

Dalam tabel 4, skor *Cross Section Random* senilai 0.0782 yang melebihi 0.05. Artinya, model regresi yang digunakan ialah model *Random Effect* (REM).

Pengujian Lagrange Multiplier

Tabel 5. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

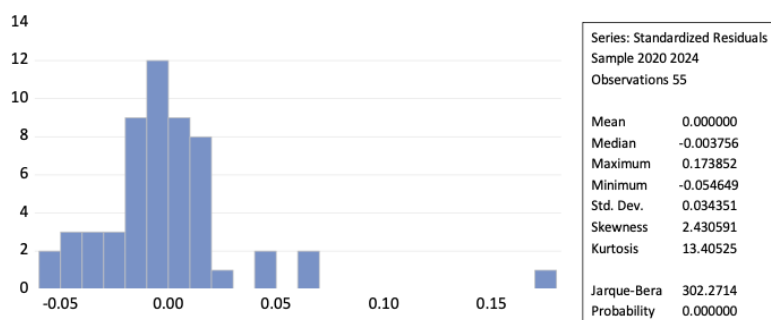
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.427089 (0.5134)	0.578866 (0.4468)	1.005955 (0.3159)

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Skor *probability Breusch-Pagan* sejumlah 0,5134 yang melebihi batas *signifikansi* 0,05 sebagaimana tersaji pada tabel 5, memperlihatkan hasil pengujian *Lagrange Multiplier*. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwasanya melalui Uji *Lagrange Multiplier*, model regresi yang ditetapkan ialah model *Common Effect* (CEM).

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Berdasarkan hasil uji *Jarque-Bera*, diperoleh nilai probabilitas sebesar $< 0,001$, sehingga residual dalam model penelitian dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual belum terpenuhi dan kondisi tersebut perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil estimasi. Ketidaknormalan residual dapat dipengaruhi oleh adanya observasi ekstrem yang menyebabkan distribusi residual menjadi tidak simetris. Oleh karena itu, keberadaan observasi yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap distribusi residual perlu diperhatikan dalam proses interpretasi hasil penelitian. Kondisi ketidaknormalan residual tersebut selanjutnya diakui sebagai salah satu keterbatasan

penelitian, sehingga hasil estimasi dan pengujian hipotesis diinterpretasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik data yang digunakan.

Keadaan ketidaknormalan distribusi teridentifikasi pada 55 data sebagaimana tersaji dalam gambar 1, dengan skor *probability Jarque-Bera* sejumlah 0.000000 yang kurang dari batas 0.05. Menurut (Ghozali, 2017), yang didasarkan pada prinsip *Central Limit Theorem*, jumlah sampel pada penelitian ini tergolong besar (≥ 30) sehingga pengujian normalitas bisa tidak dipedulikan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

	ESG	ML	KI
ESG	1	-0.068178	-0.226142
ML	-0.068178	1	-0.116525
KI	-0.226142	-0.116525	1

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Berpedoman pada perolehan tersebut, dapat ditegaskan bahwasanya model tidak terkena multikolinearitas menjadikannya memenuhi kriteria kelayakan pada uji multikolinearitas.

Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.048248	Prob. F(3,51)	0.1187
Obs*R-squared	5.914121	Prob. Chi-Square(3)	0.1159
Scaled explained SS	9.526470	Prob. Chi-Square(3)	0.0231

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Ditujukan pada pengujian model regresi berganda, identifikasi terhadap heteroskedastisitas diarahkan guna menelaah apakah residual beserta varians mengalami perubahan antar satu observasi dengan observasi lainnya. Digunakan 57 metode *glejser* oleh penulis untuk melakukan pengujian tersebut. Berdasarkan ketentuan pengujian, keberadaan heteroskedastisitas ditandai apabila nilai Probability *Obs*R-squared* berada di bawah 0,05. Sebaliknya, ketiadaan heteroskedastisitas atau terpenuhinya asumsi ditunjukkan apabila nilai Probability *Obs*R-squared* melebihi 0,05.

Besaran nilai *Obs*R-squared* berada pada tingkat yang melampaui batas signifikansi 0.05 ($0.1159 > 0.05$). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi kesamaan varians residual telah terpenuhi.

Pengujian Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Root MSE	0.039543	R-squared	0.213244
Mean dependent var	0.224480	Adjusted R-squared	0.166964
S.D. dependent var	0.044991	S.E. of regression	0.041064
Akaike info criterion	-3.477420	Sum squared resid	0.085999
Schwarz criterion	-3.331432	Log likelihood	99.62904
Hannan-Quinn criter.	-3.420965	F-statistic	4.607722
Durbin-Watson stat	1.230748	Prob(F-statistic)	0.006281

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Model regresi yang baik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh mengalami autokorelasi. Jika autokorelasi terjadi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang buruk. Dalam penelitian ini, untuk menguji autokorelasi digunakan metode *Durbin Watson* (DW) dengan kriteria sebagai berikut :

- Angka nilai DW di bawah -2 menunjukkan autokorelasi positif.
- Angka nilai DW antara -2 sampai +2 menunjukkan tidak ada autokorelasi.
- Angka nilai DW di atas +2 menandakan autokorelasi negatif.

Tersaji pada tabel 4.7, skor *Durbin-Watson stat* sejumlah 1.230748. Posisi skor tersebut ada pada kisaran -2 sampai +2, yang menjadikan kondisi ini menandakan ketiadaan gejala autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Koefisien Determinasi

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.039543	R-squared	0.213244
Mean dependent var	0.224480	Adjusted R-squared	0.166964
S.D. dependent var	0.044991	S.E. of regression	0.041064
Akaike info criterion	-3.477420	Sum squared resid	0.085999
Schwarz criterion	-3.331432	Log likelihood	99.62904
Hannan-Quinn criter.	-3.420965	F-statistic	4.607722
Durbin-Watson stat	1.230748	Prob(F-statistic)	0.006281

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Skor *Adjusted R-Squared* ialah 0.166964 dihasilkan dari temuan uji koefisien determinasi. Hal ini mengindikasikan bahwasanyasanya ketiga variabel bebas *environmental, social and governance*, manajemen laba, beserta kepemilikan institusional mampu menjabarkan sejumlah 16,6% variasi variabel dependen penghindaran pajak, kemudian sisanya yakni 83,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain.

Uji Keseluruhan (Uji F)**Tabel 10.** Uji Keseluruhan (Uji F)

Root MSE	0.039543	R-squared	0.213244
Mean dependent var	0.224480	Adjusted R-squared	0.166964
S.D. dependent var	0.044991	S.E. of regression	0.041064
Akaike info criterion	-3.477420	Sum squared resid	0.085999
Schwarz criterion	-3.331432	Log likelihood	99.62904
Hannan-Quinn criter.	-3.420965	F-statistic	4.607722
Durbin-Watson stat	1.230748	Prob(F-statistic)	0.006281

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Mengacu pada perolehan atas uji F yang disajikan melalui tabel 4.9, skor *F-Statistic* yang dihasilkan tercatat sejumlah 4.607722 lebih besar daripada F-tabel 2,786228, sementara skor *Prob (F-statistic)* sejumlah 0,006281 kurang dari 0,05. Temuan pengujian memperlihatkan bahwasanya *environmental, social, and governance*, manajemen laba, serta kepemilikan institusional dengan serentak berdampak signifikan bagi penghindaran pajak.

Uji Parsial (Uji T)**Tabel 11.** Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: ETR				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/11/26 Time: 09:29				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 11				
Total panel (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.115150	0.042237	2.726314	0.0088
ESG	0.000505	0.000608	0.829887	0.4105
ML	-0.075064	0.076324	-0.983493	0.3300
KI	1.21E-06	3.53E-07	3.416687	0.0013

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

- Perolehan atas uji T memperlihatkan bahwasanya *Environmental, Social and Governance* (X1) memperoleh t hitung sejumlah 0.829887, yang lebih rendah daripada t tabel sejumlah 2.005745, serta skor *sig.* 0.4105 yang melebihi 0.05. Dengan demikian, *environmental, social, and governance* tidak memberi pengaruh bagi penghindaran pajak. ETR yang lebih tinggi menunjukkan beban pajak efektif yang lebih besar dan tingkat tax avoidance yang lebih rendah. Sebaliknya, ETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat tax avoidance yang lebih tinggi. Oleh karena itu, koefisien positif diinterpretasikan sebagai penurunan tax avoidance, sedangkan koefisien negatif menunjukkan peningkatan tax avoidance.
- Variabel manajemen laba (X2), diperoleh skor t hitung sejumlah 0.983493, yang lebih rendah daripada t tabel sejumlah 2.005745, sedangkan skor *sig.* sejumlah 0.3300 lebih

tinggi dari 0.05. Menjadikan manajemen laba dinyatakan tidak berdampak bagi penghindaran pajak.

- c. Variabel kepemilikan institusional (X3) memperoleh nilai t hitung sebesar $3,416687 > t$ tabel sebesar 2,005745 serta nilai $sig.$ sebesar $0,0013 < 0,05$. Dengan demikian, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien kepemilikan institusional bernilai positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga peningkatan kepemilikan institusional berasosiasi dengan peningkatan ETR. Karena ETR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, maka kepemilikan institusional yang lebih tinggi berasosiasi dengan penurunan penghindaran pajak.

Pengaruh *Environmental, Social, and Governance*, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional bagi Penghindaran Pajak

Skor *Adjusted R-squared* yang dihasilkan mencapai 0.166964. Angka tersebut menerangkan bahwasanya *environmental, social, and governance*, manajemen laba, serta kepemilikan institusional berkontribusi terhadap penghindaran pajak dengan besaran 0.166964 atau setara dengan 16.6%. Temuan tersebut merujuk pada hasil yang disajikan melalui tabel 4.8 terkait pengujian koefisien determinasi. Berikutnya, tabel 4.9 yang memuat pengujian keseluruhan atau uji F memperlihatkan bahwasanya skor F-hitung melebihi F-tabel, yaitu ($4.607722 > 2,786228$), pada tingkat probabilitas 0,05. Perolehan skor *Prob. F-statistic* sejumlah ($0,006281 < 0,05$) turut memperlihatkan hasil yang memenuhi batas pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, *environmental, social, and governance*, manajemen Laba, serta kepemilikan institusional secara simultan berdampak bagi penghindaran pajak. Maka dari itu, penerimaan bagi pengajuan hipotesis keempat dari studi ini.

Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* Bagi Penghindaran Pajak

Berpedoman pada perolehan atas pengujian parsial (uji T) oleh tabel 4.10, tingkat pengaruh *environmental, social, and governance* bagi penghindaran pajak ditunjukkan melalui skor t-hitung sejumlah 0.829887, sementara skor t-tabel mencapai 2.005745. Perbandingan kedua nilai tersebut memperlihatkan bahwasanya t-hitung lebih kecil daripada t-tabel ($0.829887 < 2.005745$). Skor probability yang dihasilkan sejumlah 0.4105 juga melampaui taraf *signifikansi* 0,05. Perolehan atas pengujian tersebut sejalan dengan pengujian yang dilakukan (Nurlaely & Dewi, 2023) memperlihatkan bahwasanya dengan parsial *environmental, social, and governance* tidak memberi pengaruh bagi penghindaran pajak.

Pengaruh Manajemen Laba Bagi Penghindaran Pajak

Merujuk pada tabel 4.10 yang memuat perolehan atas pengujian parsial (uji T), perolehan skor t-hitung pada variabel manajemen laba berada di bawah t-tabel, yaitu $0.983493 <$

2.005745. Lebih dari itu, nilai *probability* sejumlah 0.3300 melampaui tingkat *signifikansi* 0,05. Berpedoman pada perolehan hasil tersebut, dengan parsial variabel manajemen laba tidak memberikan pengaruh bagi penghindaran pajak. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Sapitri & Hunein, 2022), upaya pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan oleh pihak manajemen melalui pemanfaatan peluang yang tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Bagi Penghindaran Pajak

Berpedoman pada tabel 4.10 sebagai perolehan atas pengujian parsial (uji T), nilai t-hitung pada variabel kepemilikan institusional tercatat lebih tinggi dibandingkan t-tabel, ialah ($3.416687 > 2.005745$). Selanjutnya, skor *probability* sejumlah 0.0013 tercatat lebih rendah daripada taraf *signifikansi* 0,05. Perolehan tersebut membuktikan ditemukannya pengaruh kepemilikan institusional bagi penghindaran pajak. Berpedoman pada uji T, didapatkan skor *signifikansi* sejumlah $0.0013 < 0,05$. Temuan tersebut menguatkan hipotesis yang sudah diajukan sebelumnya bahwasanya kepemilikan institusional berdampak bagi penghindaran pajak. Fungsi pengawasan terhadap beragam kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen dapat diperkuat melalui keberadaan kepemilikan institusional. Hal ini ditunjang oleh kapasitas serta sumber daya yang memadai pada investor institusional, sehingga pemantauan terhadap kegiatan operasional perusahaan dapat dilakukan secara lebih optimal (Sari & Baliwerti, 2023).

Pengaruh *Environmental, Social, and Governance*, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Bagi Penghindaran Pajak

Skor *Adjusted R-squared* yang dihasilkan mencapai 0.166964. Angka tersebut menerangkan bahwasanya *environmental, social, and governance*, manajemen laba, serta kepemilikan institusional berkontribusi terhadap penghindaran pajak dengan besaran 0.166964 atau setara dengan 16.6%. Temuan tersebut merujuk pada hasil yang disajikan melalui tabel 4.8 terkait pengujian koefisien determinasi. Berikutnya, tabel 4.9 yang memuat pengujian keseluruhan atau uji F memperlihatkan bahwasanya skor F-hitung melebihi F-tabel, yaitu ($4.607722 > 2,786228$), pada tingkat probabilitas 0,05. Perolehan skor *Prob. F-statistic* sejumlah ($0,006281 < 0,05$) turut memperlihatkan hasil yang memenuhi batas pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, *environmental, social, and governance*, manajemen Laba, serta kepemilikan institusional secara simultan berdampak bagi penghindaran pajak. Maka dari itu, penerimaan bagi pengajuan hipotesis keempat dari studi ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perolehan studi beserta pembahasan menyimpulkan bahwasanya *environmental, social, and governance*, manajemen laba, serta kepemilikan institusional secara keseluruhan berpengaruh bagi penghindaran pajak. Upaya menekan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak dapat dipahami sebagai tindakan efisiensi perpajakan, sedangkan efisiensi pajak tersebut ialah bagian dari unsur perencanaan pajak. *environmental, social, and governance* tidak berdampak bagi penghindaran pajak. manajemen laba tidak berdampak bagi penghindaran pajak. Sebab, strategi penghindaran pajak yang ditempuh pihak manajemen melalui pengurangan beban pajak penghasilan tidak menjadikan keberadaan maupun ketiadaan praktik manajemen laba oleh emiten sebagai bahan pertimbangan bagi investor. Kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak. Pihak manajer cenderung berorientasi pada peningkatan laba perusahaan, sementara pemegang saham lebih menitikberatkan perhatian pada kemakmuran yang diterima.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah sampel akhir hanya terdiri atas 11 perusahaan atau 55 observasi, sehingga cakupan objek penelitian masih terbatas. Kedua, sampel penelitian hanya mencakup perusahaan *go public* yang memiliki *ESG Score* dalam basis data *Bloomberg*, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, periode pengamatan hanya mencakup tahun 2020–2024 sehingga belum menggambarkan kondisi dalam periode yang lebih panjang. Keempat, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 16,7% menunjukkan bahwa variabel ESG, manajemen laba, dan kepemilikan institusional dalam model penelitian masih memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak, sehingga terdapat faktor lain di luar model yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, pengukuran penghindaran pajak menggunakan ETR memiliki keterbatasan dalam menggambarkan seluruh strategi penghindaran pajak perusahaan, sedangkan aspek tata kelola perusahaan dalam penelitian ini hanya diukur melalui satu proksi, yaitu kepemilikan institusional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah dan sektor perusahaan, menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, menambahkan variabel lain yang relevan dengan penghindaran pajak, menggunakan alternatif pengukuran penghindaran pajak, serta mempertimbangkan beberapa mekanisme tata kelola perusahaan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Agusetiani, M., & Irawan, R. (2025). Pengaruh Environmental Social And Governance (ESG) Insentif Pajak Dan. *Jurnal Indonesia Manajemen*, 01(4), 314–324.
- Chandra, B. (2021). *Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia*. 17, 232–247.
- Cindy Irawan, N. (2022). *Irawan dan Ngadiman: Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance IV(2)*, 521–530.
- Febriyanti, N., & Faisal. (2023). the Effect of Tax Avoidance on the Earnings Management Which Moderated By Sales Growth. *Journal Of Accounting*, 12(1), 1–13.
- Feronika, O., & Aris, S. (2024). *Implementasi Strategi Bisnis Dan Pengungkapan Esg Terhadap Tax avoidance*. 1(1), 1–18.
- Ghozali. (2017). *Analisis Multivariant dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi Dengan E Views 10* (Edisi Kedu).
- Kartika, S. E., Puspitasari, W., & Khoirah, D. M. (2023). *Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan analisa good corporate governance terhadap tax avoidance (. 1(2)*.
- Laurensia, C., & Mustika, I. G. (2024). *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi) Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Gender Diversity*. 5(November), 16–35.
- Muljadi, C., Hastuti, M. E., & Hananto, H. (2022). Tax Amnesty, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 303–320. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864>
- Nurjanah, S., & Romadhina, A. P. (2025). *Pengaruh Sales Growth , Capital Intensity Dan Environmental Social And Governance (Esg) Terhadap Tax Avoidance*. 9(2), 146–164.
- Nurlaelly, H., & Dewi, R. R. (2023). Hikmahtul Nurlaelly, R Rosiyana Dewi. *PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE, ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE, ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY DAN CORPORATE REPUTATION TERHADAP TAX AVOIDANCE*, 08(01), 1–15.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). *Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Alamat Korespondensi: Accountmaster.Thalia.R.20@Ukwms.Ac.Id*. 72–82.
- Rahmah, S. M. (2023). *Pengaruh Environmental, Social, Governance Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq45 Di Bursa Efek Indonesia*.
- Rananda, S. (2023). *Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak*. 6(1), 95–104.
- Sapitri, D., & Hunein, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Modal Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Subsektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 978–985. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.573>

- Saprianto, R., & Anggraini, Y. (2024). *Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2021)*. 19, 1323–1333. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.159>
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2024). *Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)*. 7(1), 127–137.
- Sari, B. R., & Baliwerti, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Tahun 2016-2021). *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 112–120. <http://www.jrpma.sps-perbanas.ac.id/index.php/jrpma>
- Suripto. (2021). *Pengaruh Corporate Social Responsibility , Kualitas Audit Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*. 5(1), 1651–1672.
- Wulandari, R., Nofriyanti, & Rosini, L. (2023). *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance*. 8(01), 56–78.